



**bpkad**



# Rencana Strategis

**2023 – 2026**

**Badan Pengelola Keuangan dan  
Aset Daerah  
Kota Tasikmalaya**

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	6
2.1.1. Tugas Pokok .....	6
2.1.2. Struktur Organisasi .....	19
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	21
2.2.1. Sumber Daya Manusia .....	21
2.2.2. Sarana dan Prasarana .....	22
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	57
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	63
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	63
3.2. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat .....	64
3.2.1. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan .....	64
3.2.2. Telaahan Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat.....	66
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	67
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis .....	68

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ..... 70**

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 72**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..... 74**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..... 108**

**BAB VIII PENUTUP ..... 110**

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
2.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan dan Jenis Kelamin .....	21
2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin .....	21
2.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin .....	21
2.4	Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja .....	22
2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Tahun 2018-2022 .....	25
2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKAD Tahun 2018-2022 .....	26
3.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Keuangan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong .....	65
3.2	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong .....	67
3.3	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan RTRW dan KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong .....	68
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPKAD Tahun 2023-2026 .....	71
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .....	73
6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2023-2026 .....	76
7.1	Indikator Kinerja BPKAD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 .....	108
7.2	IKU BPKAD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 .....	109

## **DAFTAR GAMBAR**

Nomor	Judul	Halaman
2.1	Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah .....	20

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Nasional, bahwa agar dapat disusun perencanaan pembangunan Nasional yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara perlu adanya sistem perencanaan pembangunan Nasional.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Renstra BPKAD) Tahun 2023-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen perencanaan transisi karena masa jabatan Wali Kota Tasikmalaya berakhir pada Tahun 2022 dan pemilihan Kepala Daerah akan dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2024.

Penyusunan Renstra BPKAD juga mengacu pada Tugas Pokok BPKAD yang diatur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 92 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya, Renstra Kementerian Keuangan, Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Hal tersebut diperlukan sebagai dasar perumusan isu-isu strategis guna menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Sedangkan untuk mencapainya maka disusunlah strategi, kebijakan dan indikator kinerja sebagai alat ukur kinerja program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif.

Renstra BPKAD Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 yang disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu-isu strategis yang berkembang.

Renstra BPKAD Tahun 2023-2026 memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting serta memiliki nilai-nilai strategis sebagai berikut:

1. Merupakan arah dan pedoman perkembangan organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama 4 (empat) tahun mendatang.
2. Merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKAD.
3. Merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja dan pengendalian dalam pelaksanaan program, kegiatan serta sub kegiatan selama 4 (empat) tahun mendatang.
4. Merupakan pedoman penilaian keberhasilan kinerja BPKAD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum Penyusunan Renstra BPKAD Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang



- Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
  16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96);
  17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
  18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
  19. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48);
  20. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 13).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renstra BPKAD Tahun 2023-2026 yaitu menyediakan dokumen perencanaan untuk periode 4 (empat) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026.

Tujuan dari penyusunan Renstra BPKAD Tahun 2023-2026 yaitu menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja BPKAD serta sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKAD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

### **Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

### **Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan Renstra Kementerian Keuangan, telaahan Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026.

### **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan dalam RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026.

### **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Bab ini berisi rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Tahun 2023-2026.

### **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang harus dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026.

### **Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka perencanaan maupun pelaksanaannya dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Kedudukan BPKAD Kota Tasikmalaya yaitu sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. BPKAD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

##### **2.1.1. Tugas Pokok**

Dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, BPKAD Kota Tasikmalaya mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. BPKAD dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi badan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Sebagai arah dan pedoman yang jelas dalam penataan organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan, serta untuk menunjang koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan komunikasi kelembagaan secara internal, lebih lanjut dijabarkan tugas pokok masing-masing sub unit organisasi.

### **1. Kepala Badan**

- 1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja badan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 2) Rincian tugas Kepala Badan, sebagai berikut :
  - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja badan;
  - b. merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan program kerja badan untuk mendukung visi dan misi daerah;
  - c. menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah meliputi penyusunan rencana anggaran daerah, pengelolaan perbendaharaan daerah, serta pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  - d. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah;
  - e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan dan barang milik daerah daerah;
  - f. menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan sistem informasi keuangan dan barang milik daerah daerah;
  - g. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Badan;
  - h. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan;
  - j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam penyelenggaraan tugas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
  - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris

Daerah;

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2. Sekretariat**

- 1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, penataan organisasi dan administrasi umum.
- 2) Rincian tugas Sekretariat sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
  - b. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan serta penganggaran Badan;
  - c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
  - d. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan pada Badan;
  - e. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Badan;
  - f. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Badan;
  - g. menyelenggarakan penataan organisasi meliputi pembinaan dan pengembangan kelembagaan, pelayanan publik dan ketatalaksanaan, peningkatan kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Badan;
  - h. mengoordinasikan penyiapan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
  - i. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
  - j. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Badan;
  - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;

- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Sekretariat, membawahkan :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
    - (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan reformasi birokrasi di lingkup Badan.
    - (2) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha, sebagai berikut:
      - a) melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
      - b) melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Badan;
      - c) melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan Badan;
      - d) melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan;
      - e) melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
      - f) melaksanakan pengelolaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan;
      - g) melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Badan;
      - h) melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan di lingkungan Badan;
      - i) melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Badan;
      - j) melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
      - k) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
      - l) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

- m) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Anggaran**

- 1) Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan dan mengoordinasikan perencanaan serta penyusunan anggaran Daerah.
- 2) Rincian tugas Bidang Anggaran :
  - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Anggaran;
  - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - c. menyelenggarakan penyiapan bahan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) dan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan (KUA-PPASP);
  - d. menyelenggarakan penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan anggaran dan perubahan APBD;
  - e. menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan APBD serta pengesahannya;
  - f. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan penyusunan anggaran;
  - g. mengkoordinasikan penyiapan bahan rancangan peraturan daerah pembentukan dana cadangan, pinjaman daerah/hutang, penyertaan modal/ investasi dan pemberian pinjaman daerah;
  - h. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Anggaran;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Anggaran, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
    - (1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas

pokok melaksanakan perumusan bahan kebijakan teknis dan perencanaan anggaran.

(2) Rincian tugas Sub Bidang Perencanaan Anggaran:

- a) melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
- b) melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS);
- c) melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan (KUPA-PPASP);
- d) melaksanakan penyusunan bahan regulasi bidang anggaran;
- e) melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan;
- f) melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah;
- g) melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan;
- h) melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan bimbingan dalam perencanaan anggaran;
- i) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
- j) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran.

(1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan bahan kebijakan teknis dan penyusunan anggaran.

(2) Rincian tugas Sub Bidang Penyusunan Anggaran:

- a) melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
- b) melaksanakan pengumpulan dan analisa bahan dalam



- rangka penyusunan APBD;
- c) melaksanakan review rencana anggaran RKA-SKPD/Perubahan RKA-SKPD;
  - d) melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
  - e) melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
  - f) melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
  - g) melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
  - h) melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan dokumen anggaran;
  - i) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
  - j) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah**

- 1) Bidang Perbendaharaan dan kas daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan kebijakan teknis perbendaharaan keuangan daerah.
- 2) Rincian tugas Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah:
  - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
  - b. menyelenggarakan penyusunan konsep petunjuk teknis perbendaharaan dan kas daerah serta verifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah;
  - d. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dalam

- penyelenggaraan penatausahaan perbendaharaan dan kas daerah;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
- a. Sub Bidang Perbendaharaan;
    - (1) Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengelolaan kas daerah.
    - (2) Rincian tugas Sub Bidang Perbendaharaan :
      - a) melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Perbendaharaan;
      - b) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan belanja;
      - c) melaksanakan verifikasi untuk pengeluaran belanja;
      - d) melaksanakan penerbitan SP2D;
      - e) melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan bimbingan dalam penatausahaan belanja;
      - f) melaksanakan rekonsiliasi kewajiban daerah;
      - g) melaksanakan penatausahaan investasi daerah;
      - h) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Perbendaharaan;
      - i) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
      - j) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - b. Sub Bidang Kas Daerah.
    - (1) Sub Bidang Kas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kas daerah.
    - (2) Rincian tugas Sub Bidang Kas Daerah :
      - a) melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Kas Daerah;

- b) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan kas daerah;
- c) melaksanakan pengumpulan data realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- d) melaksanakan penyiapan anggaran kas;
- e) melaksanakan verifikasi DPA SKPD/DPPA SKPD;
- f) memeriksa ketersediaan dana sesuai dengan anggaran kas dan menerbitkan SPD;
- g) memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran pada kas daerah;
- h) melaksanakan rekonsiliasi dan menyusun laporan data penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- i) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Kas Daerah;
- j) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **5. Bidang Akuntansi**

- 1) Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
- 2) Rincian tugas Bidang Akuntansi:
  - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Akuntansi;
  - b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah;
  - c. menyelenggarakan kebijakan akuntansi keuangan daerah;
  - d. menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan kebijakan akuntansi keuangan daerah;
  - e. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
  - f. menyelenggarakan pengelolaan tuntutan ganti rugi dan perbendaharaan;
  - g. mengkoordinasikan penyusunan tanggapan dan atau tindak

- lanjut terhadap laporan hasil pemeriksaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Akuntansi;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Akuntansi, membawahkan :
- a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja;
    - (1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan akuntansi pendapatan dan belanja.
    - (2) Rincian tugas Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja:
      - a) melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja;
      - b) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan akuntansi pendapatan dan belanja, penerimaan, pengeluaran, pembiayaan, transfer, piutang dan belanja;
      - c) melaksanakan pengumpulan dan penganalisaan data lingkup akuntansi pendapatan dan belanja, penerimaan, pengeluaran, pembiayaan, transfer, piutang dan utang belanja;
      - d) melaksanakan pembinaan pengelolaan akuntansi pendapatan dan belanja;
      - e) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja;
      - f) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
      - g) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - b. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah.
    - (1) Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah

mempunyai tugas pokok melaksanakan Pelaporan Keuangan Daerah.

- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah;
  - a) melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah;
  - b) melaksanakan pengolahan data dan informasi laporan keuangan daerah;
  - c) melaksanakan konsolidasi laporan keuangan SKPKD dengan laporan SKPD;
  - d) melaksanakan penghimpunan dan rekonsiliasi laporan Keuangan Daerah;
  - e) melaksanakan pengumpulan dan analisa bahan serta data tentang penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD;
  - f) melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
  - g) mengkoordinasikan SKPD dalam penyusunan laporan semester, laporan keuangan prognosis dan laporan keuangan akhir tahun;
  - h) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah;
  - i) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - j) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **6. Bidang Aset Daerah**

- 1) Bidang Aset Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan kebijakan pengelolaan Barang Daerah.
- 2) Rincian tugas Bidang Aset:
  - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Aset Daerah;
  - b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan barang daerah;
  - c. menyelenggarakan kebijakan pengelolaan barang

- daerah;
- d. menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan pengelolaan barang daerah;
  - e. menyelenggarakan penatausahaan neraca barang daerah dan investasi daerah;
  - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Aset Daerah;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Aset Daerah, membawahkan:
- a. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah;
    - (1) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah.
    - (2) Rincian tugas Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah:
      - a) menyusun rencana kerja Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah;
      - b) melaksanakan menyiapkan bahan dan pengumpulan serta pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan dan penyelenggaraan pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah;
      - c) melaksanakan pemeliharaan barang daerah yang berada dalam gudang induk daerah;
      - d) menyelenggarakan penyimpanan dan pendistribusian barang milik daerah dalam rangka pengamanan dan pemanfaatan barang milik daerah;
      - e) menyelenggarakan penilaian barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah;
      - f) melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah;
      - g) melaksanakan penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah;
      - h) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang

- berkaitan dengan tugas Sub Bidang pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah;
- i) melaksanakan koordnasi dengan unit kerja terkait;
  - j) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah
- (1) Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aset Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan penatausahaan aset daerah.
  - (2) Rincian tugas Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah:
    - a) menyusun rencana program Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah;
    - b) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
    - c) menyelenggarakan pelayanan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah;
    - d) menyelenggarakan fasilitasi, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap penatausahaan barang milik daerah yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah;
    - e) menyelenggarakan penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca dan atau penilaian kembali barang milik daerah;
    - f) melaksanakan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
    - g) melaksanakan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah;
    - h) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah;
    - i) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
    - j) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

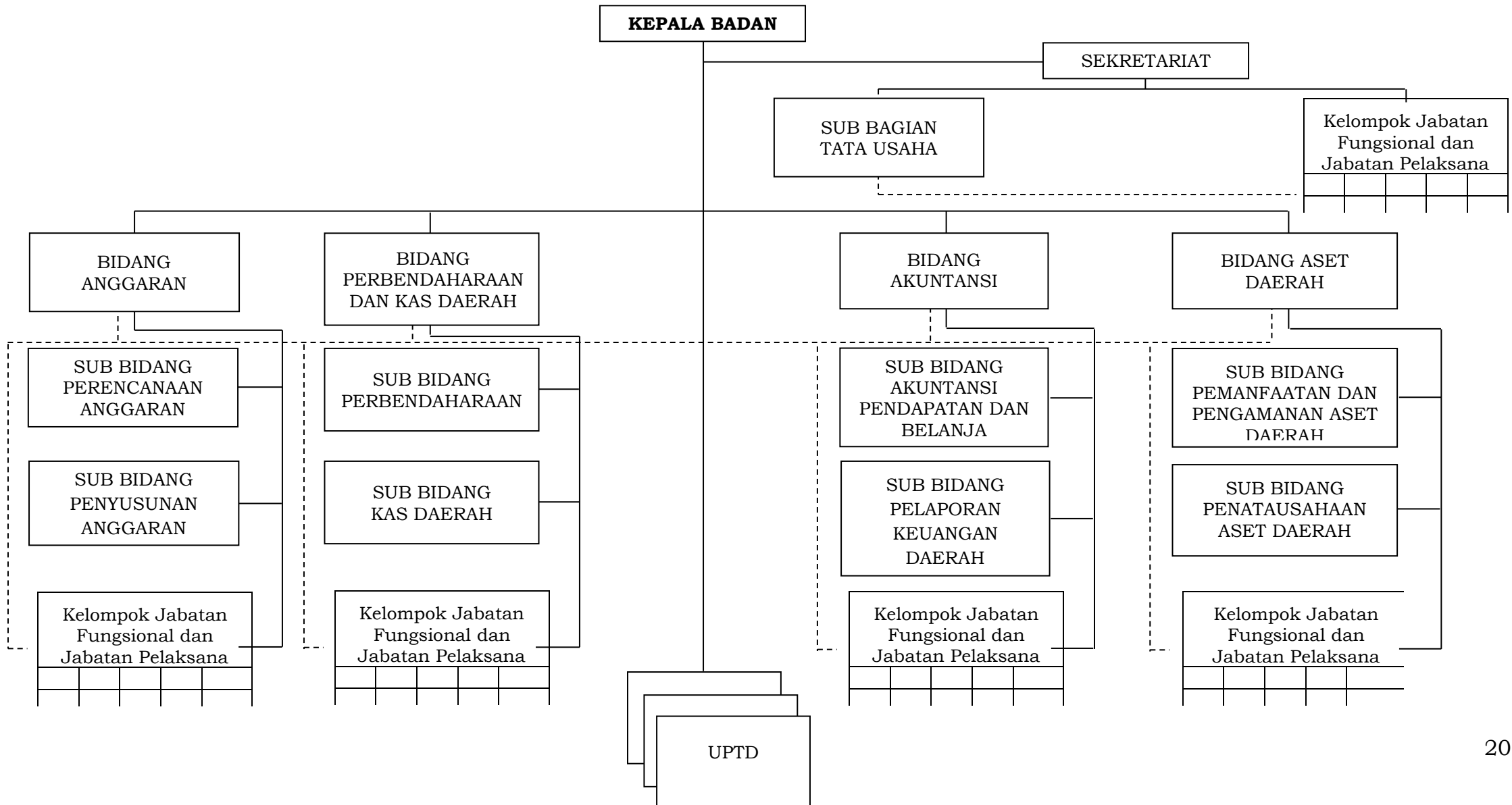
### 2.1.2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi BPKAD Kota Tasikmalaya berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
3. Bidang Anggaran membawahkan :
  - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
  - b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
4. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Perbendaharaan;
  - b. Sub Bidang Kas Daerah;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
5. Bidang Akuntansi, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja;
  - b. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
6. Bidang Aset Daerah, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah;
  - b. Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
7. UPTD



**GAMBAR 2.1**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

BPKAD Kota Tasikmalaya memegang peranan penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka mendukung hal tersebut, diperlukan sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang memenuhi kebutuhan baik dari aspek kualitas maupun kuantitas.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Komposisi Pegawai BPKAD Kota Tasikmalaya sampai dengan Bulan Maret Tahun 2022 dapat dilihat berdasarkan Kelompok Jabatan dan Jenis Kelamin pada Tabel 2.1. dan berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin pada Tabel 2.2. serta berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan dan Jenis Kelamin**

NO	KEL. JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Eselon II B	1	-	1
2	Eselon III A	-	1	1
3	Eselon III B	1	3	4
4	Eselon IV A	6	3	9
5	Pelaksana	16	17	33
6	Fungsional	4	3	7
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>28</b>	<b>27</b>	<b>55</b>

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin**

NO	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Golongan IV	2	5	7
2	Golongan III	19	21	40
3	Golongan II	7	1	8
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>28</b>	<b>27</b>	<b>55</b>

**Tabel 2.3**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin**

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	MAGISTER (S2)	5	10	15
2	SARJANA (S1)	14	13	27
3	D3	5	1	6
4	SLTA	6	1	7
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>30</b>	<b>25</b>	<b>55</b>

Tahun 2023-2026

**2.2.2 Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPKAD Kota Tasikmalaya yang merupakan pendukung kerja sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.4. sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Sarana dan Prasarana Pendukung Kerja**

<b>NO</b>	<b>JENIS BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Bangunan Gedung Kantor BPKAD	1	Baik
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	8	Baik
3	Kendaraan bermotor penumpang lainnya (dst)	1	Baik
4	Sepeda Motor	21	Baik
5	Lemari Penyimpan	1	Baik
6	Mesin Ketik Listrik	2	Baik
7	Mesin Fotocopy Folio	1	Baik
8	Lemari Besi/Metal	33	Baik
9	Lemari Kayu	39	Baik
10	Rak Besi	41	Baik
11	Rak Kayu	2	Baik
12	Filing Cabinet Besi	10	Baik
13	Brankas	2	Baik
14	Alat Penghancur Kertas	5	Baik
15	Mesin Absensi	4	Baik
16	LCD Projector/Infocus	1	Baik
17	Alat Sidik Jari	2	Baik
18	Papan Nama Instansi	55	Baik
19	Papan Pengumuman	105	Baik
20	Alat Kantor Lainnya	13	Baik
21	Meja Kerja Kayu	2	Baik
22	Kursi Kayu	6	Baik
23	Sice	1	Baik
24	Meja Rapat	41	Baik
25	Meja Resepsionis	8	Baik
26	Meja 1/2 Biro	51	Baik
27	Kursi Rapat	11	Baik
28	Kursi Tamu	3	Baik
29	Kursi Putar	91	Baik
30	Kursi Biasa	2	Baik
31	Kursi Lipat	25	Baik
32	Meubeleur lainnya	3	Baik

Tahun 2023-2026

33	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	3	Baik
34	Lemari Es	8	Baik
35	A.C. Window	3	Baik
36	A.C. Split	11	Baik
37	Televisi	6	Baik
38	Loudspeaker	9	Baik
39	Sound System	10	Baik
40	Wireless	1	Baik
41	Microphone	1	Baik
42	Unit Power Supply	3	Baik
43	Camera Video	14	Baik
44	Tangga Aluminium	1	Baik
45	Dispenser	7	Baik
46	Coffee Maker	1	Baik
47	Vertikal Blind	48	Baik
48	Bracket Standing Peralatan	4	Baik
49	Alat Pemadam/Portable	3	Baik
50	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Baik
51	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6	Baik
52	Meja Tamu Biasa	1	Baik
53	Meja Operator	10	Baik
54	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	Baik
55	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	4	Baik
56	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	Baik
57	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	Baik
58	Microphone/Wireless MIC	3	Baik
59	Microphone/Boom Stand	2	Baik
60	Uninterruptible Power Supply (UPS)	10	Baik
61	Power Amplifier	1	Baik
62	Peralatan studio audio lainnya (dst)	3	Baik
63	Video Mixer	1	Baik
64	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	2	Baik
65	Lighting Stand Tripod	2	Baik
66	Layar Film/Projector	4	Baik
67	Camera Conference	2	Baik
68	Handy Talky (HT)	12	Baik
69	Facsimile	1	Baik
70	Switcher/Patch Panel	1	Baik
71	Genset	1	Baik

Tahun 2023-2026

72	Alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya (dst)	1	Baik
73	Stabilizer	3	Baik
74	Alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst)	3	Baik
75	Scanner (Assembly/counting System)	3	Baik
76	Kamera Digital	1	Baik
77	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	Baik
78	Mini Komputer	1	Baik
79	Local Area Network (LAN)	1	Baik
80	Komputer Jaringan lainnya	1	Baik
81	P.C Unit	54	Baik
82	Lap Top	43	Baik
83	Note Book	1	Baik
84	Tablet PC	2	Baik
85	Personal Komputer lainnya	6	Baik
86	Hard Disk	17	Baik
87	Monitor	1	Baik
88	Printer (Peralatan Personal Komputer)	40	Baik
89	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	Baik
90	External	5	Baik
91	Server	7	Baik
92	Hub	7	Baik
93	Peralatan Jaringan lainnya	1	Baik
94	Air Conditioning (AC)	5	Baik

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan BPKAD Kota Tasikmalaya diukur berdasarkan Target Renstra pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tahun 2023-2026

**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Tahun 2018-2022**  
**Kota Tasikmalaya**

No.	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra BPKAD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Capaian IKM Perangkat Daerah				82	85	89	77-88		83,43	85,37	89,06	88,54		101,74	100,44	100,07	100,61	
2	Persentase waktu penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya				100	100	100			111,11	100,7	101,41			111,11	100,7	101,41		
3	Persentase laporan keuangan daerah sesuai SAP				100	100	100			100	100	100			100	100	100		
4	Persentase kesesuaian aset milik daerah dengan nilai aset di neraca				100	100	100			100	100	100			100	100	100		
5	Hasil penilaian SAKIP Perangkat Daerah				75	77	79	83		73,64	74,06	81,98	82,94		98,19	96,18	103,77	99,93	
6	Maturitas SPIP Perangkat Daerah				2	3	3			2	2,5	2,916			100	83,33	97,2		
7	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP				100	100	100			100	100	100			100	100	100		
8	Opini BPK atas LKPD Kota Tasikmalaya							WTP					WTP					100	

Tahun 2023-2026

**Tabel 2.6**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKAD Tahun 2018-2022**  
**Kota Tasikmalaya**

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
<i>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan</i>	10.586.093.300	9.166.107.381	7.460.014.626	44.114.738.320	49.174.968.570	8.865.191.411	8.562.317.739	6.983.335.753	42.077.406.141		83,74	0,93	0,94	0,95		1,18	1,60
<i>Program Peningkatan Pelayanan Publik</i>		10.000.000	40.000.000				9.346.280	39.773.650				0,93	0,99			0,50	0,75
Penyusunan SPM/ SOP tentang Pelayanan Publik		5.000.000	35.000.000				4.434.340	34.815.700				0,89	0,99			1,25	1,95
Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik		5.000.000	5.000.000				4.911.940	4.957.950				0,98	0,99			- 0,25	- 0,33

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.214.844.000</b>	<b>1.876.030.460</b>	<b>1.445.701.300</b>			<b>1.486.611.816</b>	<b>1.775.179.281</b>	<b>1.372.873.627</b>			67,12	0,95	0,95			- 0,35	- 0,34
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000	3.600.000	1.440.000			3.600.000	3.600.000	1.440.000			100,00	1,00	1,00			- 0,40	- 0,53
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	867.000.000	558.000.000	264.000.000			422.342.496	496.220.230	235.696.317			48,71	0,89	0,89			- 0,47	- 0,45
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	70.000.000	71.000.000	70.100.000			45.567.836	66.449.276	65.824.710			65,10	0,94	0,94			- 0,25	- 0,18
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	115.550.000	75.550.000	35.950.000			8.505.300	63.064.400	11.014.400			7,36	0,83	0,31			- 0,47	1,53
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	215.268.000	222.305.000	319.975.000			201.229.978	205.196.071	308.316.062			93,48	0,92	0,96			- 0,13	- 0,16



## Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Alat Tulis Kantor	88.228.000	81.000.000	86.151.300			63.155.400	80.924.925	86.104.920			71,58	1,00	1,00			- 0,25	- 0,22
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	85.000.000	72.600.000	54.685.000			65.316.680	72.328.465	54.602.240			76,84	1,00	1,00			- 0,35	- 0,38
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	15.000.000	10.000.000			9.995.200	14.998.750	9.960.500			99,95	1,00	1,00			- 0,21	- 0,28
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.000.000	79.200.000	66.000.000			73.522.900	79.127.180	65.978.688			95,48	1,00	1,00			- 0,28	- 0,36
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.600.000	15.000.000				41.208.200	13.464.000				94,51	0,90				- 0,41	- 0,56
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000	24.000.000	27.000.000			13.860.000	23.990.000	27.000.000			57,75	1,00	1,00			- 0,22	- 0,05

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Makanan dan Minuman	99.548.000	96.875.460	101.900.000			78.465.200	96.722.010	101.851.420			78,82	1,00	1,00			- 0,24	- 0,24
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	373.000.000	401.000.000	200.400.000			321.597.125	400.970.864	199.648.713			86,22	1,00	1,00			- 0,36	- 0,42
Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	136.800.000	152.400.000	156.000.000			133.645.501	149.673.110	155.423.951			97,69	0,98	1,00			- 0,22	- 0,28
Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai	6.250.000	8.500.000	52.100.000			4.600.000	8.450.000	50.011.706			73,60	0,99	0,96			1,12	1,59
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>2.580.530.000</b>	<b>1.609.847.000</b>	<b>1.250.590.000</b>			<b>2.110.988.845</b>	<b>1.285.425.514</b>	<b>1.107.342.947</b>			81,80	0,80	0,89			- 0,40	- 0,51
Pengadaan Mobil Jabatan		350.000.000					298.750.000					0,85				- 0,25	- 0,33

## Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	475.000.000	300.000.000	372.000.000			368.957.300	265.756.500	361.723.350			77,68	0,89	0,97			- 0,28	- 0,31
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10.000.000	45.000.000					31.735.000				0,00	0,71				0,63	- 0,33
Pengadaan Meubelair	105.000.000					86.784.500					82,65					- 0,25	- 0,33
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	480.000.000	190.000.000	233.800.000			449.907.000	189.568.775	233.169.267			93,73	1,00	1,00			- 0,34	- 0,45
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	188.050.000	151.875.000	181.885.000			89.685.000	123.570.900	151.659.000			47,69	0,81	0,83			- 0,25	- 0,13
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	129.760.000	132.945.000	152.945.000			105.559.146	126.258.049	91.397.400			81,35	0,95	0,60			- 0,21	- 0,36

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi	
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	91.720.000	123.600.000	127.300.000			36.625.205	58.196.190	117.609.045			39,93	0,47	0,92			-	0,16	0,20
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair	20.000.000	25.000.000									0,00	0,00				-	0,19	-
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000	80.400.000	58.000.000			13.140.000	27.910.100	51.784.500			21,90	0,35	0,89			-	0,23	0,33
Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur	45.000.000	45.000.000	19.600.000			25.855.000	28.710.000	10.878.385			57,46	0,64	0,56			-	0,39	- 0,50
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	976.000.000	166.027.000	105.060.000			934.475.694	134.970.000	89.122.000			95,75	0,81	0,85			-	0,55	- 0,73
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>40.400.000</b>	<b>45.000.000</b>				<b>28.256.250</b>	<b>36.179.000</b>				69,94	0,80				-	0,22	- 0,24

## Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	40.400.000	45.000.000				28.256.250	36.179.000				69,94	0,80				- 0,22	- 0,24
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>20.000.000</b>										0,00					- 0,25	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20.000.000										0,00					- 0,25	-
<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>3.666.223.300</b>	<b>4.123.180.800</b>	<b>3.005.635.500</b>			<b>3.584.627.209</b>	<b>4.035.064.685</b>	<b>2.926.282.187</b>			97,77	0,98	0,97			- 0,29	- 0,38
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	184.030.000	212.830.000	206.372.250			178.172.646	209.411.151	193.931.390			96,82	0,98	0,94			- 0,22	- 0,30
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	119.000.000	122.960.000	216.136.750			116.344.467	120.380.084	184.666.832			97,77	0,98	0,85			- 0,05	- 0,14

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	195.230.000	215.840.000	172.884.000			191.378.628	214.911.141	168.366.938			98,03	1,00	0,97			- 0,27	- 0,36
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	102.800.000	133.300.000	132.664.000			102.342.353	131.160.582	128.883.301			99,55	0,98	0,97			- 0,18	- 0,25
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	75.010.000	101.260.000	93.276.000			74.908.080	100.267.890	88.097.770			99,86	0,99	0,94			- 0,18	- 0,26
Percepatan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	164.330.000	138.330.000	176.469.000			163.837.754	136.765.388	176.247.110			99,70	0,99	1,00			- 0,22	- 0,29
Verifikasi Dokumen Anggaran	107.019.000	99.730.000	95.875.000			106.755.410	98.949.970	95.694.070			99,75	0,99	1,00			- 0,28	- 0,37
Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah	102.845.000	86.510.000	50.789.500			102.716.660	85.744.695	50.467.300			99,88	0,99	0,99			- 0,39	- 0,53

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Pengelolaan Data Anggaran		85.720.000	73.915.000				84.760.750	73.754.905				0,99	1,00			- 0,28	- 0,38
Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah	200.000.000					194.566.068					97,28					- 0,25	- 0,33
Penatausahaan Bantuan Keuangan Provinsi	169.626.000	148.520.000	116.260.000			163.298.451	146.114.573	112.042.880			96,27	0,98	0,96			- 0,34	- 0,45
Pengendalian Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	185.500.000	248.751.040	245.200.000			184.521.823	219.467.055	242.885.620			99,47	0,88	0,99			- 0,17	- 0,23
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	180.000.000	220.000.000				178.760.050	214.043.820				99,31	0,97				- 0,19	- 0,27
Pengendalian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	60.000.000	35.000.000	36.000.000			59.994.400	34.776.070	35.933.455			99,99	0,99	1,00			- 0,35	- 0,46

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Penyusunan Laporan Daftar Transaksi Harian Perangkat Daerah	60.000.000		27.000.000			59.974.000		26.799.100			99,96		0,99			- 0,50	- 0,67
Pelaksanaan Sistem Penggajian Pemerintah Kota Tasikmalaya	170.000.000	170.000.000	158.000.000			164.466.731	169.469.487	157.729.770			96,75	1,00	1,00			- 0,27	- 0,35
Pelaporan Pajak Orang Pribadi	70.000.000					69.330.815					99,04					- 0,25	- 0,33
Pelaporan Tahunan PPh Pasal 21 Khusus Gaji	60.000.000	107.329.760	51.750.000			59.577.950	106.432.185	51.503.700			99,30	0,99	1,00			- 0,18	- 0,24
Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	75.000.000	200.000.000	74.000.000			70.868.710	199.704.050	73.937.000			94,49	1,00	1,00			0,01	0,06
Penyusunan Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik	45.833.300	50.000.000				45.807.405	49.539.200				99,94	0,99				- 0,23	- 0,31



Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Penatausahaan Dana Transfer	150.000.000	150.000.000	75.000.000			129.713.275	148.440.737	72.954.421			86,48	0,99	0,97			- 0,38	- 0,45
Peningkatan Penatausahaan Dana Kapitasi JKN dan Dana BOS	50.000.000	50.000.000				38.826.845	40.234.750				77,65	0,80				- 0,25	- 0,32
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	200.000.000	268.000.000	243.000.000			197.707.041	265.073.510	242.356.935			98,85	0,99	1,00			- 0,19	- 0,25
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100.000.000	200.000.000	193.700.000			98.226.817	190.694.738	192.933.690			98,23	0,95	1,00			- 0,01	- 0,02
Penyusunan Pelaporan Rekonsiliasi Realisasi APBD	120.000.000	132.100.000	169.070.000			119.158.938	130.795.782	167.675.150			99,30	0,99	0,99			- 0,15	- 0,21
Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPKD	115.000.000	200.000.000	196.200.000			113.958.438	199.106.033	194.662.460			99,09	1,00	0,99			- 0,07	- 0,09

## Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	255.000.000	525.000.000	98.000.000			252.615.000	520.080.000	93.441.700			99,06	0,99	0,95			- 0,19	- 0,25
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPK Perangkat Daerah dan PPKD Dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua	200.000.000	32.000.000	61.074.000			198.097.269	30.939.425	60.329.940			99,05	0,97	0,99			- 0,23	- 0,30
Review Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah		50.000.000					48.905.920					0,98				- 0,25	- 0,33
Pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)	150.000.000	140.000.000	43.000.000			148.701.185	138.895.699	40.986.750			99,13	0,99	0,95			- 0,44	- 0,59
<b>Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah</b>	<b>1.947.696.000</b>	<b>1.407.049.121</b>	<b>1.588.087.826</b>			<b>1.543.586.811</b>	<b>1.327.890.049</b>	<b>1.407.686.039</b>			79,25	0,94	0,89			- 0,29	- 0,36
Pembuatan Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya (Protasik)		106.000.000	38.000.000				104.951.000	37.452.230				0,99	0,99			- 0,41	- 0,55

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	56.831.000	60.450.000	34.587.200			55.992.559	59.734.584	34.541.600			98,52	0,99	1,00			- 0,34	- 0,45
Pembinaan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah	349.696.000	269.700.000				326.443.745	261.895.328				93,35	0,97				- 0,31	- 0,40
Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	255.966.000	171.361.957	135.000.000			190.267.082	151.954.836	123.555.123			74,33	0,89	0,92			- 0,39	- 0,46
Konsolidasi Pencatatan Aset Daerah	226.830.000	408.650.000	533.000.000			163.565.200	405.378.378	494.638.450			72,11	0,99	0,93			0,03	0,23
Pengamanan Aset/ Barang Milik Daerah	362.534.000	265.887.164	412.000.626			199.333.650	224.981.841	302.501.646			54,98	0,85	0,73			- 0,18	- 0,18
Penilaian Barang Milik Daerah	155.230.000	125.000.000	105.500.000			135.336.550	118.994.082	85.996.990			87,18	0,95	0,82			- 0,34	- 0,47

## Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Barang Milik Daerah	75.000.000					73.344.000					97,79					- 0,25	- 0,33
Pengadaan Aset/ Barang Milik Daerah			330.000.000					329.000.000					1,00			- 0,25	- 0,33
Sensus Barang Milik Daerah	465.609.000					399.304.025					85,76					- 0,25	- 0,33
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>65.000.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>20.000.000</b>			<b>61.155.800</b>	<b>63.494.730</b>	<b>19.712.950</b>			94,09	0,98	0,99			- 0,42	- 0,55
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	10.000.000	5.000.000			14.749.800	9.338.900	4.905.500			98,33	0,93	0,98			- 0,46	- 0,61
Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	30.000.000	30.000.000	5.000.000			29.782.000	29.882.900	4.953.600			99,27	1,00	0,99			- 0,46	- 0,61

## Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Penyusunan Pelaporan Barang Perangkat Daerah	20.000.000	20.000.000	5.000.000			16.624.000	19.776.350	4.948.350			83,12	0,99	0,99			- 0,44	- 0,52
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah		5.000.000	5.000.000				4.496.580	4.905.500				0,90	0,98			- 0,25	- 0,30
<b>Program Perencanaan Kerja</b>	<b>41.400.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>110.000.000</b>			<b>39.964.680</b>	<b>29.738.200</b>	<b>109.664.353</b>			96,53	0,99	1,00			0,35	0,48
Penyusunan Rencana Kerja	10.000.000	10.000.000	5.000.000			9.531.900	9.921.200	4.930.500			95,32	0,99	0,99			- 0,38	- 0,49
Penyusunan Rencana Strategis	10.000.000					9.664.500					96,65					- 0,25	- 0,33
Penyusunan Perubahan Rencana Strategis			5.000.000					4.919.500					0,98			- 0,25	- 0,33

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	21.400.000	20.000.000	100.000.000			20.768.280	19.817.000	99.814.353			97,05	0,99	1,00			0,73	1,00
<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>10.000.000</b>					<b>10.000.000</b>					100,00					- 0,25	-
Pengelolaan Website Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.000.000					10.000.000					100,00					- 0,25	- 0,33
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>				12.407.317.920	14.232.158.571				11.196.711.467				0,90			0,04	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				171.613.800	190.000.000				170.922.640				1,00			0,03	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				67.229.300	75.000.000				67.134.928				1,00			0,03	-

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				12.049.900	15.000.000				11.975.913				0,99			0,06	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				11.978.000	15.000.000				11.740.344				0,98			0,06	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				80.356.600	85.000.000				80.071.455				1,00			0,01	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.686.919.850	11.521.692.910				8.786.623.555				0,91			0,05	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.595.508.350	11.416.692.910				8.695.858.492				0,91			0,05	-
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10.371.950	15.000.000				10.241.964				0,99			0,11	-

## Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				11.740.400	15.000.000				11.530.184				0,98			0,07	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				57.230.200	60.000.000				57.051.235				1,00			0,01	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				12.068.950	15.000.000				11.941.680				0,99			0,06	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				166.871.050	166.871.050				143.172.649				0,86			-	-
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				7.247.850	7.247.850				7.209.648				0,99			-	-
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				95.100.000	95.100.000				71.486.736				0,75			-	-



## Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				64.523.200	64.523.200				64.476.265				1,00			-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				30.477.650	33.611.000				29.570.983				0,97		0,03	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				23.611.000	23.611.000				22.715.000				0,96		-	-	-
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				6.866.650	10.000.000				6.855.983				1,00		0,11	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah				742.653.120	810.659.161				727.051.834				0,98		0,02	-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				22.196.900	11.586.100				22.159.250				1,00		- 0,12	-	-

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				205.104.170	217.256.170				204.251.421					1,00		0,01	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.617.900	18.482.300				9.413.300					0,98		0,23	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				48.269.200	78.269.200				47.445.730					0,98		0,16	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				39.630.000	39.630.000				39.227.078					0,99		-	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				25.000.000	25.000.000				24.605.000					0,98		-	-
Penyediaan Bahan/Material				67.197.400	67.197.400				59.559.966					0,89		-	-

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Fasilitasi Kunjungan Tamu				58.115.000	58.115.000				58.049.613				1,00			-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				249.956.000	249.818.000				244.927.906				0,98		-	0,00	-
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				7.566.550	20.304.991				7.412.570				0,98			0,42	-
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				10.000.000	25.000.000				10.000.000				1,00			0,38	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				246.999.600	80.764.500				240.450.390				0,97		-	0,17	-
Pengadaan Mebel				42.000.000	33.645.000				41.565.000				0,99		-	0,05	-

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				204.999.600	47.119.500				198.885.390				0,97			-	0,19	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				788.503.500	809.511.500				645.802.420				0,82			0,01		-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000	4.000.000				3.730.000				0,93			-		-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				271.000.000	259.008.000				220.155.462				0,81			-	0,01	-
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				43.391.500	43.391.500				27.722.000				0,64			-		-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				470.112.000	503.112.000				394.194.958				0,84			0,02		-

## Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				573.279.350	619.048.450				453.116.996				0,79			0,02	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				211.892.900	259.747.100				158.201.400				0,75			0,06	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				91.746.500	103.086.400				33.988.850				0,37			0,03	-
Pemeliharaan Mebel					14.585.000												-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				269.639.950	241.629.950				260.926.746				0,97		-	0,03	-
<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>				29.434.551.750	31.644.751.749				28.697.240.642				0,97			0,02	-

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi	
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				1.955.462.290	1.813.229.089				1.932.922.229				0,99			-	0,02	-
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				200.600.000	208.892.000				199.444.430				0,99			0,01		-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				198.169.000	208.892.000				193.135.415				0,97			0,01		-
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD				45.350.000	47.070.175				45.084.535				0,99			0,01		-
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD				45.350.000	47.070.175				44.234.535				0,98			0,01		-
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				251.400.000	254.274.000				244.717.621				0,97			0,00		-

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				302.307.290	298.391.540				299.002.345				0,99		-	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				779.236.000	612.228.599				774.702.093				0,99		-	0,05	-
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				44.350.000	45.470.200				44.195.835				1,00		0,01		-
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				44.350.000	45.470.200				44.198.750				1,00		0,01		-
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				44.350.000	45.470.200				44.206.670				1,00		0,01		-
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				735.803.000	967.000.000				733.154.283				1,00		0,08		-

## Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				23.528.000	28.133.000				23.309.108				0,99			0,05	-
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				19.547.300	65.375.000				19.405.950				0,99			0,59	-
Penatausahaan Pembiayaan Daerah				83.900.000	82.715.000				83.603.750				1,00		-	0,00	-
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				113.528.000	104.371.000				113.024.007				1,00		-	0,02	-
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				53.425.000	59.875.000				53.140.753				0,99			0,03	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				287.654.290	435.590.000				287.176.470				1,00			0,13	-



## Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait				52.883.000	70.683.000				52.354.480				0,99			0,08	-
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				35.550.000	46.590.000				35.471.070				1,00			0,08	-
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				65.787.410	73.668.000				65.668.695				1,00			0,03	-
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				1.433.263.800	1.251.500.000				1.371.898.412				0,96		-	0,03	-
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban				100.000.000	70.000.000				99.517.243				1,00		-	0,08	-
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				100.000.000	70.000.000				99.339.127				0,99		-	0,08	-

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				125.000.000	125.000.000				124.677.634				1,00			-	-
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				350.000.000	300.000.000				345.261.240				0,99		-	0,04	-
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				200.000.000	185.000.000				174.414.938				0,87		-	0,02	-
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				100.000.000	100.000.000				99.097.399				0,99		-	-	-
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				458.263.800	401.500.000				429.590.831				0,94		-	0,03	-

## Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				25.310.022.660	27.613.022.660				24.659.265.718				0,97			0,02	-
Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi				250.000.000	250.000.000				41.906.200				0,17			-	-
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				25.060.022.660	27.363.022.660				24.617.359.518				0,98			0,02	-
<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>				2.272.868.650	3.298.058.250				2.183.454.032				0,96			0,11	-
Pengelolaan Barang Milik Daerah				2.272.868.650	3.298.058.250				2.183.454.032				0,96			0,11	-

## Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Penyusunan Standar Harga				146.242.000	166.781.900				140.836.800				0,96			0,04	-
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				849.348.000	1.589.277.600				833.927.040				0,98			0,22	-
Penatausahaan Barang Milik Daerah				342.145.000	314.378.300				326.494.853				0,95		- 0,02	-	-
Inventarisasi Barang Milik Daerah				57.704.000	57.704.000				57.296.400				0,99			-	-
Pengamanan Barang Milik Daerah				397.168.550	626.175.450				352.929.719				0,89			0,14	-
Penilaian Barang Milik Daerah				70.309.100	61.439.000				66.611.500				0,95		- 0,03	-	-

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				270.174.000	303.424.000				269.485.920				1,00			0,03	-
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				74.539.000	76.939.000				72.486.800				0,97			0,01	-
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				65.239.000	76.939.000				63.385.000				0,97			0,04	-
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					25.000.000											-	-

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholders* serta menghadapi kondisi perekonomian global dan domestik yang sangat dinamis, Kementerian Keuangan dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan senantiasa berinovasi dalam memberikan pelayanan yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan mengidentifikasi potensi dan permasalahan sebagai acuan dalam menyusun strategi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara.

Potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian Keuangan pada periode 2020-2024 dikelompokkan dalam 5 (lima) tema sesuai dengan fungsi Kementerian Keuangan, yakni 1) Pengelolaan Fiskal, 2) Penerimaan Negara, 3) Belanja Negara, 4) Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan, serta 5) Birokrasi dan Layanan Publik.

### A. Pengelolaan Fiskal

Potensi:

1. Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi.
2. Meningkatnya peran teknologi digital (*fintech*) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Pengaruh Indonesia dalam forum internasional dan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Amerika, dan Eropa yang semakin kuat.

Permasalahan:

1. Ruang fiskal yang terbatas untuk membiayai pembangunan.
2. Ketidakpastian perekonomian global akibat konflik, stagnasi, konstelasi dan dinamika politik global.
3. Isu non-ekonomi yang berpengaruh pada ekonomi (*global warming, ageing population, keterbatasan energi, dan deforestasi*).
4. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan adanya pandemi *Covid-19*.

### B. Penerimaan Negara

Potensi:

1. Perluasan subyek dan obyek penerimaan negara (pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN).
2. Kemudahan akses dan pertukaran data.

3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan penerimaan negara.
4. Ekonomi digital Indonesia berkembang dengan sangat cepat, ditunjukkan dengan pertumbuhan sektor *e-commerce*, *online travel*, *online media*, dan *ride hailing* yang cukup tinggi selama tahun 2015-2019.

Permasalahan:

1. Administrasi perpajakan (penerimaan negara) belum optimal.
2. Pengetahuan dan kesadaran WP atau K/L terkait kewajiban perpajakan dan PNBP masih rendah.
3. *Free Trade Agreements* (FTAs) berpotensi menurunkan penerimaan.
4. Ketergantungan PNBP dari SDA migas maupun SDA non-migas pada realisasi *cost recovery* harga komoditi tambang di pasar internasional.
5. Regulasi yang komprehensif terkait pemajakan atas perdagangan melalui transaksi elektronik belum selesai disusun seluruhnya.
6. Basis data transaksi digital yang memadai belum tersedia.
7. Adanya permasalahan dari faktor eksternal seperti pandemi *Covid-19* yang berdampak menurunnya realisasi penerimaan negara.
8. Perlambatan kegiatan ekspor impor maupun menurunnya aktivitas produksi dan konsumsi barang yang dikenakan cukai karena pandemi *Covid-19*.

C. Belanja Negara

Potensi:

1. Sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran nasional.
2. Alokasi transfer ke daerah dan dana desa yang semakin meningkat.
3. Berkembangnya prinsip *new thinking of working* pada institusi pemerintah pusat dan daerah.
4. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam perencanaan dan penganggaran pada K/L maupun pada pemerintah daerah.
5. Peningkatan peran belanja negara dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional seiring dengan bertambahnya alokasi belanja K/L.

6. *Awareness* dan pemahaman pengelola keuangan K/L terkait prinsip *value for money* dalam perencanaan dan penganggaran semakin meningkat.

Permasalahan:

1. Masih terdapat indikasi inefisiensi pengelolaan APBD pada Pemerintah Daerah.
2. Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) belum optimal.
3. Prinsip *value for money* dalam perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan.
4. Pelaporan pertanggungjawaban atas belanja daerah yang belum terstandar.
5. Sinergi belanja pemerintah daerah dalam upaya pencapaian program prioritas nasional perlu ditingkatkan.

D. *Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan*

Potensi:

1. Implementasi *The Integrated Financial Management Information System* (IFMIS) serta integrasi *database* keuangan untuk mendukung *business intelligence* pemerintah.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara oleh K/L semakin meningkat.
3. Penyederhanaan serta penajaman proses bisnis pengelolaan keuangan negara dan daerah yang didorong oleh perkembangan teknologi informasi.
4. Peran penting investasi pada BUMN (PMN), BLU, dan Pemda/BUMD sebagai alat fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
5. Hasil pengelolaan BMN yang meningkat sehingga dapat berkontribusi pada pengurangan eksposur APBN (*cost saving*).
6. Pasar keuangan yang cukup besar baik domestik maupun internasional.
7. Peran strategis BLU dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
8. Semakin berkembangnya instrumen pembiayaan non-APBN.

Permasalahan:

1. Kualitas pelaksanaan anggaran K/L masih rendah.
2. Kesadaran (*awareness*) pengelola BMN pada beberapa K/L yang masih rendah.



3. Masih terdapat permasalahan administrasi BMN pada K/L.
4. Mitigasi risiko kerugian pada aset pemerintah yang disebabkan adanya bencana/*force majeure* belum diterapkan menyeluruh pada semua Kementerian/Lembaga.
5. Risiko *sudden reversal* dan *crowding-out*.
6. Rata-rata tingkat bunga utang cenderung semakin meningkat.
7. Peningkatan eksposur risiko keuangan negara yang disebabkan antara lain karena bencana, lingkungan, perubahan iklim dan pandemi.
8. Pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan kebutuhan anggaran belanja yang berdampak terhadap pelebaran defisit sehingga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pembiayaan negara.
9. Pengembangan IFMIS memerlukan waktu yang lama (*multi years*) dan merupakan *collaborative work* dari banyak pihak yang terkait.

#### E. Birokrasi dan Layanan Publik

Potensi:

1. Komitmen pimpinan yang tinggi untuk melakukan reformasi birokrasi.
2. Implementasi transformasi digital Kementerian Keuangan.
3. Penerapan TIK yang makin ekstensif dalam pelayanan dan pemrosesan data.
4. Pelaksanaan audit berbasis risiko dan penggunaan *Audit Management System (AMS TeamMate)* yang terintegrasi.
5. Telah diterapkannya *enterprise risk management (ERM)* pada seluruh unit kerja di lingkungan Kemenkeu.
6. Penerapan *Three Lines of Defense* di Kemenkeu dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi APIP.
7. Infrastruktur pembelajaran yang modern baik fisik maupun nonfisik.
8. Kementerian Keuangan menuju *Functional-based organization* (kaya jabatan fungsional).
9. Kebutuhan dan pengembangan kompetensi SDM keuangan negara untuk KLID semakin besar.

Permasalahan:

1. Sinergi dan koordinasi antar unit belum optimal.

2. Kesiapan organisasi menghadapi perkembangan TI global yang cepat.
3. Praktik KKN atau *irregularities* yang masih terjadi.
4. Manajemen pengetahuan belum sinergi dan efektif.
5. Pemanfaatan pengetahuan belum optimal.
6. *Kemenkeu Corporate University* belum sepenuhnya dipahami dan dijalankan oleh setiap lini organisasi Kementerian Keuangan.

Selain harus selaras dengan Renstra Kementerian Keuangan, Renstra BPKAD Kota Tasikmalaya juga harus sejalan dengan Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat. Dalam Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat terdapat peluang dan tantangan yang perlu menjadi perhatian, adapun tantangan dan peluang tersebut yaitu sebagai berikut :

Peluang dalam pengembangan pelayanan yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Peran BPKAD yang strategis;
2. Mudah berkoordinasi dengan pusat;
3. Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan dan aset yang masih bisa dikembangkan;
4. Komitmen Kepala Daerah untuk menyelesaikan permasalahan aset daerah;
5. Cukup banyaknya aset daerah yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan pelayanan dan pendapatan daerah.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut :

1. Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset di seluruh OPD belum optimal;
2. Penerapan *e-government* belum merata pada seluruh birokrasi pemerintah, terjadi tumpang tindih sistem aplikasi dan belum terintegrasi, inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi serta dalam pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK masih sering terjadi;
3. Bertambahnya anggaran yang menimbulkan meningkatnya jumlah paket pengadaan barang dan jasa;
4. Tuntutan transparansi informasi publik menuju *good governance*;
5. Pelaksanaan e-audit dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK;
6. Fasilitas pengelola barang yang belum memadai.

Berdasarkan hasil analisis terhadap tantangan dan peluang pada Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat, maka BPKAD Kota Tasikmalaya harus mempersiapkan diri untuk mengatasi tantangan dan peluang yang akan dihadapi pada periode Tahun 2023-2026.

Tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut :

1. Pandemi *Covid-19* yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi;
2. Kesiapan organisasi dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi global yang cepat;
3. Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset daerah pada seluruh Perangkat Daerah belum optimal;
4. Penerapan *e-government* belum merata pada seluruh birokrasi pemerintah, terjadi tumpang tindih sistem aplikasi dan belum terintegrasi;
5. Tuntutan transparansi informasi publik menuju *good governance*;
6. Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sering berubah.

Peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut :

1. Pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Komitmen Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk mempertahankan Opini WTP;
3. Sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran keuangan daerah;
4. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat;
5. Komitmen pimpinan untuk melaksanakan reformasi birokrasi;
6. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
7. Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan dan aset daerah yang masih bisa dikembangkan;
8. Terdapat Website BPKAD Kota Tasikmalaya sebagai media informasi.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, BPKAD Kota Tasikmalaya menghadapi beberapa kendala dan permasalahan. Namun demikian, BPKAD berusaha secara optimal agar hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan sehingga tidak mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPKAD Kota Tasikmalaya yaitu sebagai berikut :

1. Aplikasi SIPD belum dapat berjalan secara optimal. Aplikasi SIPD masih terus dilakukan penyempurnaan oleh Kemendagri sehingga masih terdapat banyak permasalahan dalam proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBD;
2. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah belum ditindaklanjuti dengan Perubahan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baru;
3. Kurang tertibnya pengelolaan barang milik daerah pada semua Perangkat Daerah;
4. Sinergi dan koordinasi antar unit kerja belum optimal;
5. Sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah belum terintegrasi;
6. Penyerapan belanja pada Perangkat Daerah belum sesuai dengan alokasi yang diatur dalam anggaran kas, sehingga mengakibatkan penumpukan penyerapan pada akhir tahun anggaran;
7. Belum terselesaikannya penanganan hukum beberapa aset bermasalah;
8. Pensertifikatan aset tetap tanah masih belum optimal;
9. Belum dilakukan penyempurnaan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan seiring dengan terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru;
10. Belum memadainya jumlah aparatur yang menangani Pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah.

## **3.2 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat**

### **3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020 - 2024 bahwa Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah :

**“Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”**

Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

- a. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;
- b. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;
- c. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif;
- d. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum; dan
- e. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah BPKAD Kota Tasikmalaya beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya berdasarkan pada hasil telaahan terhadap Sasaran Renstra Kementerian Keuangan dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut :

Tahun 2023-2026

**Tabel 3.1**  
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra**  
**Kementerian Keuangan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong**

Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Keuangan	Permasalahan Pelayanan BPKAD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
- Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas;	- Penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun;	- Penyerapan anggaran tidak sesuai dengan perencanaan anggaran kas;	- Surat Edaran Wali Kota Tasikmalaya tentang Percepatan Penyerapan Anggaran;
- Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;	- Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah;	- Belum optimalnya pelaksanaan inventarisasi aset daerah;	- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pemanfaatan aset daerah dengan cara sewa dan lelang barang milik daerah;
- Organisasi yang <i>it for purpose</i> ;	- Masih terdapat beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi;	- Belum dilakukan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan seiring dengan terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru;	- Komitmen pimpinan untuk melaksanakan reformasi birokrasi;
- SDM yang kompetitif;	- Kurang tertibnya pengelolaan keuangan dan aset daerah pada semua Perangkat Daerah;	- Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset pada seluruh Perangkat Daerah belum optimal;	- Peningkatan Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan dan aset melalui kegiatan Pembinaan/ Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dilaksanakan secara berkala setiap tahun;
- Sistem informasi manajemen yang terintegrasi.	- Masih terdapat ketidaksesuaian data pada sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah.	- Sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah belum terintegrasi.	- Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

### **3.2.2 Telaahan Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat**

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah “TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI”.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif Dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pada Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang berkaitan secara langsung dengan tupoksi BPKAD Provinsi Jawa Barat adalah misi ke lima yaitu ”Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota” dengan sasaran Provinsi Jawa Barat yang pertama yaitu “Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel” yang dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran BPKAD.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah BPKAD Kota Tasikmalaya beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya berdasarkan pada hasil telaahan terhadap Sasaran Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut :

Tahun 2023-2026

**Tabel 3.2**  
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra**  
**BPKAD Provinsi Jawa Barat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong**

Sasaran Jangka Menengah Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan BPKAD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
- Terwujudnya Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	- Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset daerah pada seluruh Perangkat Daerah belum optimal.	- Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sering berubah.	- Peningkatan Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan dan aset melalui kegiatan Pembinaan/ Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dilaksanakan secara berkala setiap tahun;

### 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031. Lingkup RTRW Kota Tasikmalaya meliputi Wilayah Kota dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan dan 69 (enam puluh sembilan) kelurahan, mencakup seluruh wilayah daratan seluas kurang lebih 18.385 Ha (delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh lima hektar) beserta ruang udara di atasnya dan ruang di bawah bumi.

Tujuan penataan ruang di Wilayah Kota adalah mewujudkan ruang Kota Tasikmalaya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Priangan Timur-Pangandaran, yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya Kota Tasikmalaya sebagai pusat perdagangan, jasa, dan industri kreatif termaju di Jawa Barat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang



Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian wilayah Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota dan Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang berpotensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup lainnya di tingkat Kabupaten/Kota.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah BPKAD Kota Tasikmalaya beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya berdasarkan pada hasil telaahan terhadap RTRW dan KLHS dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut :

**Tabel 3.3**  
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan RTRW dan KLHS**  
**Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong**

RTRW dan KLHS terkait Tugas dan Fungsi BPKAD	Permasalahan Pelayanan BPKAD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
- Perencanaan keuangan terkait dengan rencana pengembangan tata ruang dan infrastruktur Kota Tasikmalaya.	- Belum terintegrasinya konsep tata ruang dengan rencana anggaran keuangan.	- Kurangnya pemahaman mengenai konsep tata ruang.	- Regulasi tentang RTRW dan KLHS.

### 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain). Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil penelaahan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah terhadap sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Keuangan, Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, diperoleh isu-isu strategis yang berkaitan dengan BPKAD Kota Tasikmalaya. Isu-isu strategis tersebut harus direspon dan disikapi dalam kerangka penyusunan Rencana Strategis BPKAD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026. Adapun isu-isu strategis tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan adanya pandemi *Covid-19*;
2. Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sering berubah;
3. Kecepatan perkembangan teknologi informasi;
4. SDM pengelola keuangan dan aset daerah yang Profesional dan kompeten;
5. Sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah terintegrasi;
6. Transparansi informasi publik;
7. Reformasi Birokrasi;
8. Tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah;
9. Pengamanan dan pemanfaatan barang milik daerah;

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026. Adapun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi BPKAD Kota Tasikmalaya pada tujuan ke-5 yaitu terwujudnya implementasi reformasi birokrasi dan sasaran ke-11 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif berbasis teknologi informasi, dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, profesional dan inovatif berbasis teknologi informasi;
2. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan yang diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah.

Arah kebijakan :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang ditunjang oleh penyediaan sarana prasarana yang memadai;
2. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan;
3. Peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah.

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 tersebut, maka disusun tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD Kota Tasikmalaya beserta indikator kerjanya yang disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut

Tahun 2023-2026

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPKAD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN				TARGET AKHIR RENSTRA
					2023	2024	2025	2026	
1	Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori (Point)	60,01 (B)	60,34 (B)	60,75 (B)	61,24 (B)	61,24 (B)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang Transparan, Efektif dan Efisien	Capaian IKM Perangkat Daerah	Kategori (Point)	88,67 (A)	89,01 (A)	89,28 (A)	89,42 (A)	89,42 (A)
			Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori (Point)	83,05 (A)	83,17 (A)	83,26 (A)	83,35 (A)	83,35 (A)
2	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib, transparan dan akuntabel		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	50	52	55	59	59
		Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib, transparan dan akuntabel	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Dalam merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths/kekuatan, Weaknesses/kelemahan, Opportunities/peluang, dan Threats/ancaman). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan profesional;
2. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang ditunjang oleh penyediaan sarana prasarana yang memadai;
2. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan BPKAD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut :

Tahun 2023-2026

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

<b>Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya</b>			
Tujuan 5	Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi		
Sasaran 11	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif berbasis teknologi informasi		
<b>Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah kebijakan</b>
1. Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi	1.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang Transparan, Efektif dan Efisien	1.1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan profesional;	1.1. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang ditunjang oleh penyediaan sarana prasarana yang memadai;
2. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib, transparan dan akuntabel	2.1. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib, transparan dan akuntabel	2.1. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.	2.1. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan. Program dan kegiatan strategis mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026.

Program dan kegiatan dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pagu indikatif merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan prioritas tahunan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan target kinerja program dan kegiatan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

Adapun program dan kegiatan BPKAD Kota Tasikmalaya untuk Tahun 2023-2026 yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
  - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
  - 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
  - 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
  - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
  - 4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - 5) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - 1) Pengelolaan Barang Milik Daerah

Rincian rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut :



Tahun 2023-2026

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2023-2026**  
**BPKAD Kota Tasikmalaya**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi				Indeks Reformasi Birokrasi	59,58 (CC)	Kategori (Point)	60,01 (B)	12.239.746.000	60,34 (B)	12.239.746.000	60,75 (B)	12.314.746.000	61,24 (B)	12.314.746.000	61,24 (B)	49.108.984.000	BPKAD	Kota Tasikmalaya
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang Transparan, Efektif dan Efisien			Capaian IKM Perangkat Daerah	88,54 (A)	Kategori (Point)	88,67 (A)	2.686.000.000	89,01 (A)	2.686.000.000	89,28 (A)	2.716.000.000	89,42 (A)	2.716.000.000	89,42 (A)	10.804.000.000	BPKAD	Kota Tasikmalaya

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	82,94 (A)	Kategori (Point)	83,05 (A)	9.553.746.000	83,17 (A)	9.553.746.000	83,26 (A)	9.598.746.000	83,35 (A)	9.598.746.000	83,35 (A)	38.304.984.000	BPKAD	Kota Tasikmalaya
		0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian IKM Perangkat Daerah	88,54 (A)	Kategori (Point)	88,67 (A)	2.686.000.000	89,0 1 (A)	2.686.000.000	89,2 8 (A)	2.716.000.000	89,4 2 (A)	2.716.000.000	89,4 2 (A)	10.804.000.000	BPKAD	Kota Tasikmalaya
				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	82,94 (A)	Kategori (Point)	83,05 (A)	9.553.746.000	83,1 7 (A)	9.553.746.000	83,2 6 (A)	9.598.746.000	83,3 5 (A)	9.598.746.000	83,3 5 (A)	38.304.984.000	BPKAD	Kota Tasikmalaya

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		0 2 1 , 0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah	100	%	100	195.000.000	100	195.000.000	100	240.000.000	100	240.000.000	100	870.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya
				Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	%	100		100		100		100					
		0 2 0 1 , 1 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja BPKAD	2	Dokumen	2	65.000.000	2	65.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	8	280.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 1 , 2 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	14	Dokumen	13		13		13		13		52		Sekretariat	Kota Tasikmalaya
						Laporan	1	10.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	50.000.000		

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		0 2 0 1 , 3 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKAP- SKPD Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKAP-SKPD	14	Dokumen  Laporan	13  1	  10.000.000	13  1	  10.000.000	13  1	  15.000.000	13  1	  15.000.000	52  4	  50.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 1 , 4 0 1	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	14	Dokumen  Laporan	13  1	  10.000.000	13  1	  10.000.000	13  1	  15.000.000	13  1	  15.000.000	52  4	  50.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 1 , 5 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah DPPA- SKPD Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPPA-SKPD	14	Dokumen  Laporan	13  1	  10.000.000	13  1	  10.000.000	13  1	  15.000.000	13  1	  15.000.000	52  4	  50.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		0 2 0 1 , 6 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	2		2		2		2		8		Sekretariat	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 1 , 7 0 1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja BPKAD	16	Laporan	4	15.000.000	4	15.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	16	70.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya
		0 2 1 , 0 2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai SAP</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>9.358.746.000</b>	<b>100</b>	<b>9.358.746.000</b>	<b>100</b>	<b>9.358.746.000</b>	<b>100</b>	<b>9.358.746.000</b>	<b>100</b>	<b>37.434.984.000</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>Kota Tasikmalaya</b>

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		0 2 0 1 , 1 0 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	55	Orang	55	9.258.746.000	55	9.258.746.000	55	9.258.746.000	55	9.258.746.000	37.034.984.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya	
		0 2 0 1 , 3 0 2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan SKPD yang Diverifikasi	12	Dokumen	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	48	40.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 1 , 4 0 2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2	Laporan	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 1 , 5 0 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	8	200.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		0 2 0 1 , 6 0 2	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	Laporan	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 1 , 7 0 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD	17	Laporan	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 1 , 8 0 2	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	Laporan	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		0 2 1 , 0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Perangkat Daerah sesuai Standar	100	%	100	174.000.000	100	174.000.000	100	174.000.000	100	174.000.000	696.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya	
		0 2 0 1 , 1 0 3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dokumen	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	40.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya	
		0 2 0 1 , 2 0 3	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Kendaraan/ Bangunan Kantor yang diasuransikan	24	Unit	24	95.100.000	24	95.100.000	24	95.100.000	24	95.100.000	380.400.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya	
		0 2 0 1 , 3 0 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2	Laporan	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	40.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya	



Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		0 2 0 1 , 5 0 3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah SKPD	2	Laporan  Dokumen	2  1	  50.000.000	2  1	  50.000.000	2  1	  50.000.000	2  1	  50.000.000	8  200.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya	
		0 2 0 1 , 6 0 3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	2	Laporan	2	8.900.000	2	8.900.000	2	8.900.000	2	8.900.000	8 35.600.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya	
		<b>0 2 1 , 0 5</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>290.000.000</b>	<b>100</b>	<b>290.000.000</b>	<b>100</b>	<b>290.000.000</b>	<b>100</b>	<b>290.000.000</b>	<b>100</b> <b>1.160.000.000</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>Kota Tasikmalaya</b>	
		0 2 0 1 , 1 0 5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	Jenis	2	90.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	2	90.000.000	8 360.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya	

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		0 2 0 1 , 2 0 5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	70	Stel	240	60.000.000	240	60.000.000	240	60.000.000	240	60.000.000	960	240.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 1 , 3 0 5	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Kepegawaian BPKAD	60	Laporan	55	10.000.000	55	10.000.000	55	10.000.000	55	10.000.000	220	40.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 1 , 4 0 5	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Laporan	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	48	40.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 1 , 5 0 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Laporan	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	48	80.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		0 2 0 1 , 9 0 5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	Orang	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	16	400.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya
		<b>0 2 1 , 0 6</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>727.000.000</b>	<b>100</b>	<b>727.000.000</b>	<b>100</b>	<b>757.000.000</b>	<b>100</b>	<b>757.000.000</b>	<b>100</b>	<b>2.968.000.000</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>Kota Tasikmalaya</b>
		0 2 0 1 , 1 0 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	2	Jenis	11	15.000.000	11	15.000.000	11	15.000.000	11	15.000.000	44	60.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 1 , 2 0 6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor Jumlah Perlengkapan Kantor	4	Jenis  Unit	23  8	200.000.000  200.000.000	23  8	200.000.000  200.000.000	23  8	200.000.000  200.000.000	23  8	200.000.000  200.000.000	92  32	800.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		0 2 0 1 , 3 0 6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	4	Jenis	17	15.000.000	17	15.000.000	17	15.000.000	17	15.000.000	68	60.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 1 , 4 0 6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	1	Jenis	32	70.000.000	32	70.000.000	32	70.000.000	32	70.000.000	128	280.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 1 , 5 0 6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	3	Jenis	10	35.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000	40	140.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 1 , 6 0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	264	Eksemplar	267	22.000.000	267	22.000.000	267	22.000.000	267	22.000.000	1068	88.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		0 2 0 1 , 7 0 6	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Alat Tulis Kantor	4	Jenis	20	75.000.000	20	75.000.000	20	75.000.000	20	75.000.000	80	300.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 1 , 8 0 6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	12	55.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	48	220.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 1 , 9 0 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	Laporan	30	200.000.000	30	200.000.000	30	230.000.000	30	230.000.000	120	860.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya
		0 2 1 1 , 0 0 6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	12	Laporan	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	48	60.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		0 2 1 1 , 1 0 6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan Website BPKAD	12	Laporan	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	48	100.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya
		<b>0 2 1 , 0 7</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai Standar</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100</b>	<b>600.000.000</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>Kota Tasikmalaya</b>
		0 2 0 1 , 5 0 7	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	0	Unit	19	50.000.000	19	50.000.000	19	50.000.000	19	50.000.000	76	200.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya
		0 2 1 1 , 1 0 7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	3	Paket	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	400.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		0 2 1 , 0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	850.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	3.400.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya	
		0 2 0 1 , 1 0 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	12	Buah	400	10.000.000	400	10.000.000	400	10.000.000	400	10.000.000	1600	40.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 1 , 2 0 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik	12	Bulan	12	280.000.000	12	280.000.000	12	280.000.000	12	280.000.000	1.120.000.000	1.120.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 1 , 3 0 8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Jenis	9	50.000.000	9	50.000.000	9	50.000.000	9	50.000.000	36	200.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		0 2 0 1 , 4 0 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Keamanan, Kebersihan dan Supir	12	Orang	11	510.000.000	11	510.000.000	11	510.000.000	11	510.000.000	2.040.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya	
		0 2 1 , 0 9	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	%	<b>100</b>	<b>495.000.000</b>	<b>100</b>	<b>495.000.000</b>	<b>100</b>	<b>495.000.000</b>	<b>100</b>	<b>495.000.000</b>	<b>1.980.000.000</b>	<b>Sekretariat</b>	<b>Kota Tasikmalaya</b>	
		0 2 0 1 , 1 0 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21	Unit	21	200.000.000	21	200.000.000	21	200.000.000	21	200.000.000	800.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya	



Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		0 2 0 1 , 2 0 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	Unit	3	80.000.000	3	80.000.000	3	80.000.000	3	80.000.000	12	320.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 1 , 5 0 9	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	Jenis	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	24	60.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya
		0 2 1 1 , 1 0 9	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	1	Unit	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	800.000.000	Sekretariat	Kota Tasikmalaya

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib, transparan dan akuntabel				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	47,25	Indeks	50	17.023.550.000	52	17.264.028.000	55	21.819.417.000	59	22.288.330.000	59	75.395.325.000	BPKAD	Kota Tasikmalaya
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib, transparan dan akuntabel				Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Opini	WTP	17.023.550.000	WTP	17.264.028.000	WTP	21.819.417.000	WTP	22.288.330.000	WTP	75.395.325.000	BPKAD	Kota Tasikmalaya
		02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	100	14.148.550.000	100	14.389.028.000	100	18.819.417.000	100	19.288.330.000	100	66.645.325.000	Bidang Anggaran, Perbendaharaan dan Akuntansi	Kota Tasikmalaya

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		0 2 2 , 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan APBD yang Sesuai dan Tepat Waktu	100	%	100	1.520.000.000	100	1.520.000.000	100	1.650.000.000	100	1.650.000.000	100	6.340.000.000	Bidang Anggaran	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 2 , 1 0 1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	1	Dokumen	2	180.000.000	2	180.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	8	760.000.000	Bidang Anggaran	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 2 , 2 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	Dokumen	2	180.000.000	2	180.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	8	760.000.000	Bidang Anggaran	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 2 , 3 0 1	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang Diverifikasi	400	Dokumen	400	40.000.000	400	40.000.000	400	50.000.000	400	50.000.000	1600	180.000.000	Bidang Anggaran	Kota Tasikmalaya

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		0 2 0 2 , 4 0 1	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKAP- SKPD yang Diverifikasi	300	Dokumen	400	40.000.000	400	40.000.000	400	50.000.000	400	50.000.000	1600	180.000.000	Bidang Anggaran	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 2 , 7 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	Dokumen	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	8	1.000.000.000	Bidang Anggaran	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 2 , 8 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Jumlah Dokumen	3	Dokumen	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	12	800.000.000	Bidang Anggaran	Kota Tasikmalaya

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
		0 2 0 2 , 9 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	Dokumen	2	500.000.000	2	500.000.000	2	550.000.000	2	550.000.000	8	2.100.000.000	Bidang Anggaran	Kota Tasikmalaya
		0 2 1 2 , 0 0 1	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2	Laporan	2	40.000.000	2	40.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	8	180.000.000	Bidang Anggaran	Kota Tasikmalaya
		0 2 1 2 , 1 0 1	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2	Laporan	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	8	200.000.000	Bidang Anggaran	Kota Tasikmalaya

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		0 2 1 2 , 2 0 1	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2	Laporan	2	40.000.000	2	40.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	8	180.000.000	Bidang Anggaran	Kota Tasikmalaya
		<b>0 2 2 , 0 2</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai Standar</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>785.000.000</b>	<b>100</b>	<b>785.000.000</b>	<b>100</b>	<b>909.875.000</b>	<b>100</b>	<b>1.278.125.000</b>	<b>100</b>	<b>3.758.000.000</b>	<b>Bidang Perbenda haraan</b>	<b>Kota Tasikmalaya</b>
		0 2 0 2 , 1 0 2	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah	12	Laporan	12	40.000.000	12	40.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	48	280.000.000	Bidang Perbenda haraan	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 2 , 3 0 2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Anggaran Kas SKPD Jumlah Dokumen SPD Terbit Jumlah DPA- SKPD dan	435 Dokumen  435 Dokumen  800 Dokumen	Dokumen	435	150.000.000	435	150.000.000	435	150.000.000	435	150.000.000	1740  1740  3200	600.000.000	Bidang Perbenda haraan	Kota Tasikmalaya

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				DPPA-SKPD yang Diverifikasi														
		0 2 0 2 , 5 0 2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4	Laporan	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	16	400.000.000	Bidang Perbendaharaan	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 2 , 6 0 2	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Laporan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai	4	Laporan	4	50.000.000	4	50.000.000	4	59.875.000	4	100.000.000	16	259.875.000	Bidang Perbendaharaan	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 2 , 7 0 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12	Laporan	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	428.125.000	48	1.328.125.000	Bidang Perbendaharaan	Kota Tasikmalaya

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)															
		0 2 0 2 , 9 0 2	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12	Laporan	12		12		12		12		48		Bidang Perbendaharaan	Kota Tasikmalaya
				Jumlah Dokumen SP2D yang diterbitkan	7000	Dokumen		70.000.000		70.000.000		100.000.000		200.000.000	28.000	440.000.000		
				Jumlah Dokumen SPM yang diverifikasi	7000	Dokumen									28.000			
		0 2 1 2 , 1 0 2	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah	75	Orang	100		100		100		100		100		Bidang Perbendaharaan	Kota Tasikmalaya
								75.000.000		75.000.000		100.000.000		200.000.000		450.000.000		



Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		0 2 2 , 0 3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP	100	%	100	900.000.000	100	900.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	3.800.000.000	Bidang Akuntansi	Kota Tasikmalaya	
		0 2 0 2 , 2 0 3	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan Daerah	4	Dokumen	36	75.000.000	36	75.000.000	36	100.000.000	36	100.000.000	144	350.000.000	Bidang Akuntansi	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 2 , 3 0 3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17	Laporan	12	75.000.000	12	75.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	48	350.000.000	Bidang Akuntansi	Kota Tasikmalaya

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		0 2 0 2 , 4 0 3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	Laporan	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	800.000.000	Bidang Akuntansi	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 2 , 5 0 3	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD	1	Dokumen	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	8	800.000.000	Bidang Akuntansi	Kota Tasikmalaya

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		0 2 0 2 , 7 0 3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1	Laporan	2	75.000.000	2	75.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	8	350.000.000	Bidang Akuntansi	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 2 , 8 0 3	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Analisis Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD	1	Laporan	1	75.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	350.000.000	Bidang Akuntansi	Kota Tasikmalaya
		0 2 1 2 , 1 0 3	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah	37	Orang	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	800.000.000	Bidang Akuntansi	Kota Tasikmalaya

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		0 2 2 , 0 4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Kewenangan Keuangan Daerah	100	%	100	10.943.550.000	100	11.184.028.000	100	15.259.542.000	100	15.360.205.000	100	52.747.325.000	Bidang Perbenda haraan	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 2 , 7 0 4	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1	Laporan	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	4	1.000.000.000	Bidang Perbenda haraan	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 2 , 9 0 4	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	Laporan	2	10.693.550.000	2	10.934.028.000	2	15.009.542.000	2	15.110.205.000	8	51.747.325.000	Bidang Perbenda haraan	Kota Tasikmalaya

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		0 3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Standar	100	%	100	2.875.000.000	100	2.875.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	8.750.000.000	Bidang Aset Daerah	Kota Tasikmalaya
		0 2 3 , 0 1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Standar	100	%	100	2.875.000.000	100	2.875.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	8.750.000.000	Bidang Aset Daerah	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 3 , 1 0 1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga	2	Dokumen	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	8	600.000.000	Bidang Aset Daerah	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 3 , 2 0 1	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan	1	Dokumen	2	75.000.000	2	75.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	8	350.000.000	Bidang Aset Daerah	Kota Tasikmalaya

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Barang Milik Daerah														
		0 2 0 3 , 3 0 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	2	1.150.000.000	2	1.150.000.000	2	1.150.000.000	2	1.150.000.000	8	1.600.000.000	Bidang Aset Daerah	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 3 , 4 0 1	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	1	75.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	350.000.000	Bidang Aset Daerah	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 3 , 5 0 1	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2	Laporan	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	8	800.000.000	Bidang Aset Daerah	Kota Tasikmalaya

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		0 2 0 3 , 6 0 1	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	1	Laporan	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	800.000.000	Bidang Aset Daerah	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 3 , 7 0 1	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Sertifikat Tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya	50	Dokumen	50	300.000.000	50	300.000.000	50	300.000.000	50	300.000.000	200	1.200.000.000	Bidang Aset Daerah	Kota Tasikmalaya
		0 2 0 3 , 8 0 1	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah	2	Dokumen	1	75.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	350.000.000	Bidang Aset Daerah	Kota Tasikmalaya
		0 2 1 3 , 0 0 1	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtangan an Barang Milik Daerah	2	Dokumen	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	12	1.000.000.000	Bidang Aset Daerah	Kota Tasikmalaya

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		0 2 1 3 , 1 0 1	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	2	Dokumen	36	75.000.000	36	75.000.000	36	100.000.000	36	100.000.000	144	350.000.000	Bidang Aset Daerah	Kota Tasikmalaya
		0 2 1 3 , 2 0 1	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	2	Laporan	2	75.000.000	2	75.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	8	350.000.000	Bidang Aset Daerah	Kota Tasikmalaya
		0 2 1 3 , 3 0 1	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	Orang	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.000.000.000	Bidang Aset Daerah	Kota Tasikmalaya



**BAB VII****KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja adalah alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai dalam periode empat tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026.

Indikator kinerja BPKAD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja BPKAD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026**

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir Renstra
			2023	2024	2025	2026	
1	Capaian IKM Perangkat Daerah	Kategori (Point)	88,67 (A)	89,01 (A)	89,28 (A)	89,42 (A)	89,42 (A)
2	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori (Point)	83,05 (A)	83,17 (A)	83,26 (A)	83,35 (A)	83,35 (A)
3	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indicator* sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Adapun IKU BPKAD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 ditetapkan sebagai berikut :

Tahun 2023-2026

**Tabel 7.2**  
**IKU BPKAD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>ALASAN/ PENJELASAN</b>	<b>FORMULASI</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang Transparan, Efektif dan Efisien	Capaian IKM Perangkat Daerah	Kategori (Point)	Permenpan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Sekretariat	BPKAD
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori (Point)	Permenpan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	Hasil Penilaian SAKIP BPKAD oleh Inspektorat	Sekretariat	BPKAD
2.	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib, transparan dan akuntabel	Opini BPK atas LKPD Kota Tasikmalaya	Opini	Opini BPK atas LKPD Kota Tasikmalaya	Opini dari BPK	Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Bidang Aset Daerah	BPKAD

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra BPKAD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dalam empat tahun mendatang.

Renstra BPKAD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 yang dituangkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang selalu mengalami perubahan, maka dokumen Renstra ini tidak bersifat kaku dan senantiasa selalu memperhatikan perubahan yang terjadi serta secara periodik dituangkan dalam dokumen perubahan Renstra.

Tujuan dan sasaran dalam dokumen Renstra ini dapat tercapai apabila terdapat komitmen dari seluruh komponen untuk bersama mewujudkannya secara transparan, profesional dan bertanggung jawab serta menjaga konsistensi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan.

Demikian dokumen Renstra ini dibuat, semoga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026.

**Tasikmalaya, 24 Mei 2022**

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH**



**Drs. H. ASEP GOPARULLAH, M.Pd**  
**NIP. 19700215 198903 1 004**